

**PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL OLAHAN BUAH BELIMBING
DI KELURAHAN KARANGSARI KOTA BLITAR
(Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas UMKM dan Koperasi Daerah Kota Blitar)**

Dida Rahmadanik, Mardiyono, Abdul Wachid

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: dida.rahmadanik@yahoo.co.id

Abstract: *The Empowerment of Small Industrial Processing of Star Fruit in Karang Sari Village at Blitar City. (Case Study in Departement of Trade and Industry, Regional Cooperative and UMKM Blitar). Small industry is labor intensive industries in nature because it does not depend on modern machines production. The empowerment of small industries is expected to provide employment to increase incomes. As well as star fruit processing industry in Blitar city Karang Sari village which is a new industry in the processing of food and beverages, is expected in addition to employment and the welfare of society of Karang Sari village or Blitar society. The purpose of this study is to know empowerment of small industries, as well as the efforts government in order to overcome the existing barriers.*

Keywords: *small industry, empowerment.*

Abstrak: **Pemberdayaan Industri Kecil Olahan Buah Belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi Daerah Kota Blitar).** Industri kecil merupakan industri yang padat karya karena tidak tergantung pada mesin-mesin modern saat berproduksi. Dengan pemberdayaan industri kecil diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti halnya industri olahan buah belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar yang merupakan industri baru dalam pengolahan makanan dan minuman. Industri kecil olahan buah belimbing selain menyerap tenaga kerja diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat baik dari Kelurahan Karang Sari maupun dari Kota Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan industri kecil oleh pemerintah daerah kepada masyarakat Kelurahan Karang Sari.

Kata kunci: industri kecil, pemberdayaan

Pendahuluan

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita bangsa Indonesia, hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia yang melimpah di darat maupun laut dapat dikelola dengan baik dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran maka bangsa Indonesia perlu melakukan pembangunan. Pembangunan suatu Negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga semua masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2005, h. 2) “pembangunan sendiri merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Dengan adanya ekonomi pembangunan maka pembangunan

diharapkan dapat terbentuk industri-industri yang dapat mengelola sumber daya yang ada. Dengan memberdayakan pelaku industri kecil, menengah, maupun besar maka diharapkan dapat-menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia dari yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik sehingga dengan adanya pemberdayaan maka diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri. Mengingat bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah industri yang padat karya, maka industri kecil cocok untuk dikembangkan. Jangkauan industri kecil sangatlah luas, serta dapat dilaksanakan baik di kota maupun di desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Industri-Industri kecil di Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya menurut Tambunan (2003, h.70-81)

permasalahan dalam pengembangan industri kecil di Indonesia menyangkut aspek finansial seperti modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi. Industri kecil kebanyakan tidak berminat untuk meminta kredit dari perbankan dan bantuan dari BUMN. Dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan dalam pelaksanaan otonomi daerah bahwa pemerintah pusat meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah kota maupun kabupaten. Kota Blitar merupakan salah satu kota yang sedang giat membangun ekonomi lokal melalui pengembangan potensi lokal yang bergerak dalam industri kecil dan menengah. Salah satu yang menjadi produk unggulan Kota Blitar adalah olahan buah belimbing. Buah belimbing yang dijadikan makanan dan minuman merupakan inovasi baru dalam pemasaran buah belimbing. Industri ini ada mulai tahun 2010. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini yang berkompeten adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai peranan yang besar dalam pemberdayaan industri kecil olahan buah belimbing.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Henry dalam Pasolong (2008, h.8) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

2. Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2005, h.23) “definisi dari administrasi pembangunan yaitu sebagai usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Terdapat beberapa ciri dari administrasi pembangunan seperti yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1974, h.14) dalam bukunya pengantar administrasi pembangunan sebagai berikut:

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang.
2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
3. Berorientasi pada usaha-usaha mendorong perubahan (*inovasi*) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan.
4. Berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah. administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “*development agent*”
5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain
6. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparat pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agent*)
7. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi kepada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

3. Pembangunan

Rogers (Suryono, h.2010) mengatakan pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik. Tujuan dari pembangunan menurut Tjokrowinoto (1995, h.218) sebagai berikut pelaksanaan pembangunan menuju industrialisasi dengan pertumbuhan sebesar 6% pertahun. Dengan tujuan pemerataan pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial termasuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan dari kerusakan.

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Sedarmayanti (2001, h.81) merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan, dan peningkatan secara terus menerus. Tahapan pemberdayaan yang diungkapkan oleh Prijono dan Pranaka (1996, h.20):

- a. Tahap inisiasi, yakni pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat.
- b. Tahap partisipatoris, yakni pemberdayaan dari pemerintah bersama rakyat, dan untuk rakyat.
- c. Tahap emansipatoris, yakni pemberdayaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah.

5. Industri Kecil

Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 pasal 5 sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar
3. Milik warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2006 h.27) penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subyek penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pemberdayaan industri kecil olahan

buah belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. (2) Faktor penghambat dalam pemberdayaan Industri olahan buah belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. (3) Upaya pemerintah dalam menghadapi hambatan-hambatan pemberdayaan industri kecil olahan buah belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar.

Lokasi penelitian di Kota Kota Blitar dan situs penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kota Blitar. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan dalam Sugiyono (2008, h.247). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil Olahan Buah Belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar

Kota Blitar yang terkenal dengan buah belimbing yang banyak di budidayakan di Kelurahan Karang Sari menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung di Kota ini. Pada mulanya pemasaran buah belimbing hanya dijual sebagai buah untuk oleh-oleh, namun karena buah belimbing yang sudah masak tidak dapat bertahan lama maka masyarakat Kelurahan Karang Sari mengolah buah belimbing menjadi beberapa macam olahan makanan dan minuman. Di antaranya dijadikan sirup belimbing, sari belimbing, dodol belimbing, manisan belimbing.

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengupayakan pemberdayaan industri kecil olahan buah belimbing melalui cara-cara berikut ini:

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia pelaku industri kecil olahan buah belimbing
- b. Meningkatkan akses dalam pemasaran hasil industri kecil olahan buah belimbing.

2. Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Industri Kecil Olahan Buah Belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar

Pemberdayaan industri kecil olahan buah belimbing di Kelurahan Karang Sari masih menemui beberapa hambatan. Diantaranya minimnya sumber daya manusia sebagai pendamping sehingga setiap melakukan pelatihan pegawai dinas terkait selalu meminta bantuan

dari tenaga profesional dari provinsi maupun swasta. Seperti yang diungkapkan oleh Suharto (2011, h.66-67) mengenai aras mezzo pemberdayaan yaitu strategi pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Dimana pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan, kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Selain itu hambatan lain mengenai iklim usaha yang kurang kondusif dimana masih banyaknya pengusaha yang belum mengurus ijin mendirikan usaha dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Hambatan dari pelaku usaha sendiri berupa minimnya modal usaha yang dimiliki sehingga menghambat perkembangan usaha mereka. Pendapat dari Sjafuldin (1995, h.105) mengungkapkan bahwa permodalan yang terbatas sangat mempengaruhi kelangsungan industri kecil. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan permodalan yang tidak memberatkan pelaku industri kecil. Selain masalah permodalan industri kecil olahan buah belimbing dihadapkan pada kelangkaan bahan baku saat musim hujan. Kelangkaan bahan baku ini disebabkan karena saat musim hujan bunga belimbing rontok sehingga petani belimbing mengalami gagal panen.

3. Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan Pemberdayaan Industri Kecil Olahan Buah Belimbing di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan pemberdayaan industri kecil adalah melakukan:

1. Pemberdayaan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk pelaku industri kecil olahan buah belimbing. Pemerintah sudah

cukup baik dalam mengelola pemberdayaan industri kecil dimana dalam pelaksanaannya pemerintah telah memberikan bantuan berupa mixer, penutup kemasan, dan juga penampungan sari belimbing. selain itu dalam hal pemasaran pemerintah menyediakan stand-stand serta pameran rutin sebulan sekali yang diadakan di Kebonrojo

2. Pemberian bantuan modal usaha. Dinas Koperasi dan UMKM telah memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku industri kecil melalui dana bergulir. Dana bergulir merupakan pinjaman modal yang diterima oleh pelaku industri kecil baik perorangan maupun kelompok, dengan dana maksimal 15.000.000,00 bagi kelompok yang memiliki barang jaminan dan kelompok yang tidak memiliki barang jaminan maksimal 1.000.000,00

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan industri kecil olahan buah belimbing di Kelurahan Karang Sari sudah cukup baik yaitu dengan adanya pembinaan dan pelatihan satu bulan sekali yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Blitar, dalam hal pemasaran pemerintah Kota Blitar berupaya agar produk olahan buah belimbing dapat dikenal masyarakat melalui pameran-pameran tingkat regional maupun nasional. Hambatan yang masih dihadapi dalam pemberdayaan industri kecil olahan buah belimbing berupa masih minimnya tenaga pendamping, iklim usaha kurang kondusif, minimnya modal usaha, dan kelangkaan bahan baku saat musim hujan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu memberikan bantuan berupa alat untuk pengolahan buah belimbing berupa mixer, oven, mesin penutup kemasan. Serta adanya bantuan permodalan yang disebut dana bergulir.

Daftar Pustaka

- Moleong, J Lexy. (2006) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2008) **Teori Administrasi Publik**. Bandung, Alfabeta.
- Priyono dan Pranarka. (1996) **Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi**. Jakarta, CSIS.
- Sedarmayanti (2001) **Sumber Daya Manusia & Produktifitas Kerja**. Bandung, Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2005). **Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sjafuldin, Hetifah. (1995) **Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil**. Bandung, Yayasan Akgita.
- Suharto, Edi. (2010). **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. Bandung, Refika Aditama
- Suryono, Agus. (2010) **Dimensi-Dimensi Prima Teori Administrasi Pembangunan**. Malang, UB press.

- Tambunan, Tulus. (2003) **Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting**. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Tjokromidjojo, Bintoro. (1974) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, LP3ES.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1995) **Teori Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah, dan Strategi**. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.